BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

- Komunikasi yang digunakan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga perlu ditingkatkan lagi agar pengelola dan penerima manfaat paham mengenai pemanfaatan serta tujuan dari Program Indonesia Pintar.
- 2. Dalam pelaksanaan program indonesia pintar sekolah menengah pertama koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara para pelaksana koordinasi baik dari pihak Dinas, Sekolah Maupun Orangtua penerima manfaat sudah menyadari penuh tentang pentingnya koordinasi. Sehingga koordinasi dalam pelaksanaan PIP dalam dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.
- 3. Kompetensi partisipan telah dilaksanakan oleh pihak dinas sesuai dengan Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. dimana pihak dinas telah membentik tim pengelolaan Program Indonesia Pintar namun dalam pelaksanaannya tim ini masih

belum optimal dikarenakan tidak menjalankan tanggangjawab yang berkaitan dengan sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

- 4. Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak adanya kesepakatan yang dibuat oleh pihak dinas dan pihak sekolah. Namun antara pihak sekolah dan pihak orangtua penerima manfaat telah dibuat kesepakatan dimana pada saat setelah pencairan wajib melunasi biaya komite tetapi pihak orangtua penerima manfaat masih belum bertanggungjawab akan hal tersebut.
- 5. Kontinuitas Perencanaan tidak optimal dikarenakan tim yang dibentuk oleh dinas tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum dikoordinir secara baik.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya:

- Dinas pendidikan harus menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah penerima Program Indonesia Pintar mengenai data-data siswa penerima agar mencegah permasalahan hukum dikemudian hari.
- 2. Dinas pendidikan perlu menegaskan kepada pihak sekolah agar rutin membuat laporan berkaitan dengan PIP.
- Dinas pendidikan perlu menjalin koordinasi dengan pihak sekolah dalam mengawasi pemanfaatan PIP agar digunakan tepat pada tujuan dari Program Indonesia Pintar

- 4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU perlu melaksanakan sosialisasi tentang Program Indonesia Pintar agar Pihakpihak yang terlibat paham mengenai apa itu PIP, tujuan dan manfaat serta cara pemanfaatannya agar program tersebut dapat berjalan secara optimal.
- Pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga perlu menjalankan salah satu peran dan fungsinya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kesekolah-sekolah setiap triwulan
- 6. Perlu adanya penegasan khusus bagi penerima manfaat agar pemanfaatan program tersebut sesuai dengan tujuan dan manfaat yang sudah diatur sehingga orangtua siswa tidak menyalahgunakan keuangan dari program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho Riant, 2010. Publik Policy. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.Refka Aditama:Jakarta.
- Silalahi Ulber, 2010. Metodologi Penelitian Sosial. Refka Aditama: Bandung.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Syafiie, Kencana, Inu, 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi). Rineka Cipta: Jakarta.
- Thoha, 2010. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sumber Lain

- Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jendral Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017. *Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Kelembagaan Riset Dikti: Jakarta.

Internet

- http://ldiisumenep.org/otonomi-pendidikan-sebagai-jawaban-dalam-menghadapi-tantangan-dunia-pendidikan-dan-peningkatan-mutu-pendidikan-sekolah/diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 20.20
- http://digilib.unila.ac.id/5176/14/BAB%20II.pdf/diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 08.00